



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Setya Budi Arijanta, SH., KN
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Dipaparkan pada acara "Webinar ASN Belajar Seri 45" yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7 Desember 2023



1

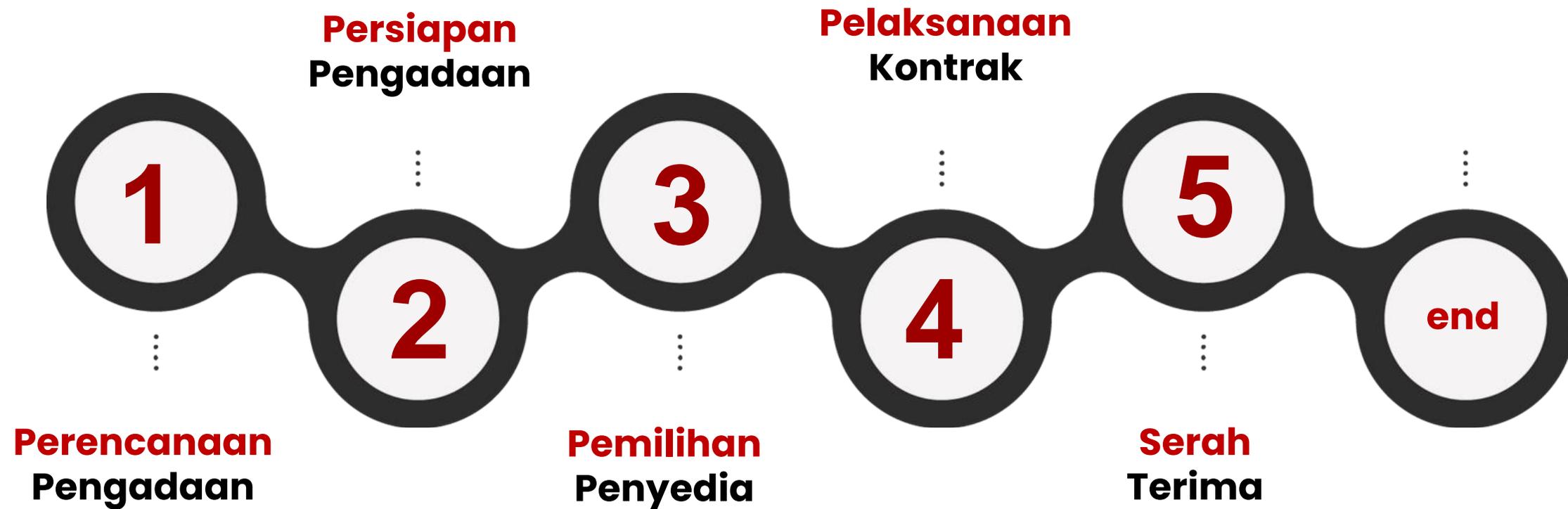
**Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018**
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

2

**Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021**
tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



- Peraturan LKPP No. 3/2021 tentang Pedoman Swakelola
- Peraturan LKPP No. 4/2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha
- Peraturan LKPP No. 5/2021 tentang Pedoman Pengadaan yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan LKPP No. 6/2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan LKPP No. 7/2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan
- Peraturan LKPP No. 9/2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik
- Peraturan LKPP No. 11/2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan LKPP No. 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia





Swakelola

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, ormas atau kelompok masyarakat



Penyedia

Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak



PENGADAAN BARANG JASA

E-Purchasing

Tender Cepat

Tender

Pengadaan Langsung

Penunjukan Langsung

Swakelola I, II, III, IV

Korupsi dapat terjadi pada setiap metode PBJ



INDEKS KOMPETISI

Rata Rata **8** Penyedia/Etalase
393 (72,5 %) Pemda < Indeks

**174 (32,1 %) Pemda < 3 Penyedia per
Etalase**



PENGAWASAN :

www.e-katalog.lkpp.go.id



Transaksi diawasi secara realtime



PRODUK & PENYEDIA



7,04 Juta Produk Tayang
105 Ribu Penyedia
(7 November 2023)

Peluang
Korupsi



Tahapan E-Purchasing dengan Negosiasi



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Pilih Produk

PPK/PP mencari produk sesuai dengan kebutuhan



Produk Ber-TKDN

Pilih Produk dengan TKDN tertinggi sesuai Kepka LKPP 122 Tahun 2022



Produk UMK-K

Apakah paket tersebut untuk UMK-K



Negosiasi

Prioritaskan negosiasi kepada penyedia yang menyangkan harga terendah

Penyimpangan pada tahap Perencanaan

1. Pengadaan tanpa justifikasi identifikasi kebutuhan dan tidak didukung proses perencanaan yang sistematis
2. Kurang tepat dalam menentukan cara pengadaan
3. Intervensi negatif dalam penganggaran pengadaan
4. Penganggaran pengadaan tanpa perhitungan kebutuhan yang tepat atau kebutuhan biaya pengadaan tidak komprehensif
5. Tindakan pemecahan paket menghindari tender
6. Perhitungan kuantitas dan waktu proses pengadaan yang tidak cermat
7. Pengangkatan pelaku pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan tidak tepat waktu
8. Tidak mempersiapkan kebutuhan kerja aparatur pelaku pengadaan
9. Adanya intervensi vendor sejak perencanaan
10. Risalah pembahasan perencanaan pengadaan tidak terdokumentasikan
11. Pihak yang menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan tidak memahami dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan
12. Tidak mengumumkan RUP atau pemilihan penyedia dilakukan sebelum pengumuman RUP

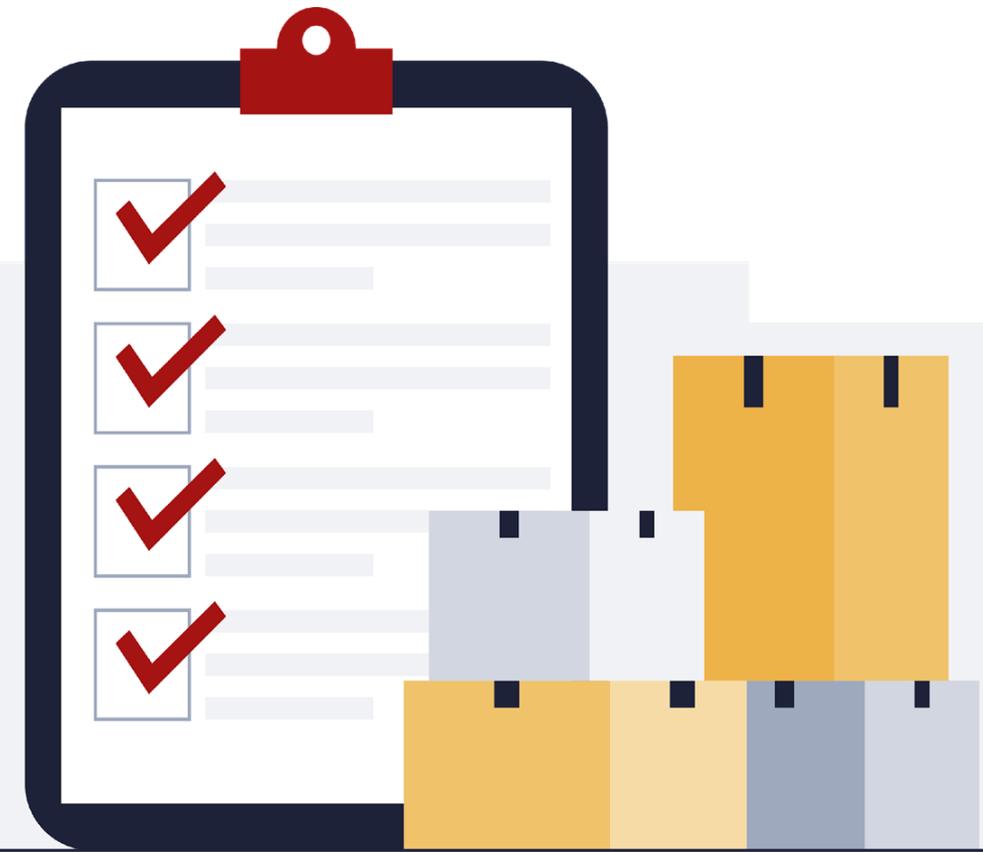


LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Penyimpangan pada tahap Persiapan

1. Spesifikasi teknis / KAK tidak disusun sejak perencanaan
2. Penetapan spesifikasi teknis / KAK tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Spesifikasi teknis / KAK diskriminatif;
4. Spesifikasi teknis / KAK sudah melibatkan vendor yang akan melaksanakan;
5. Spesifikasi teknis / KAK menyalin sama persis dengan produk atau merk tertentu
6. Pemahaman kurang akan spesifikasi teknis / KAK
7. Spesifikasi teknis / KAK yang dibuat tidak didasari identifikasi ketersediaan pasar dan pelaku usaha
8. Spesifikasi teknis / KAK yang ditetapkan tidak dapat diukur dengan jelas capaiannya

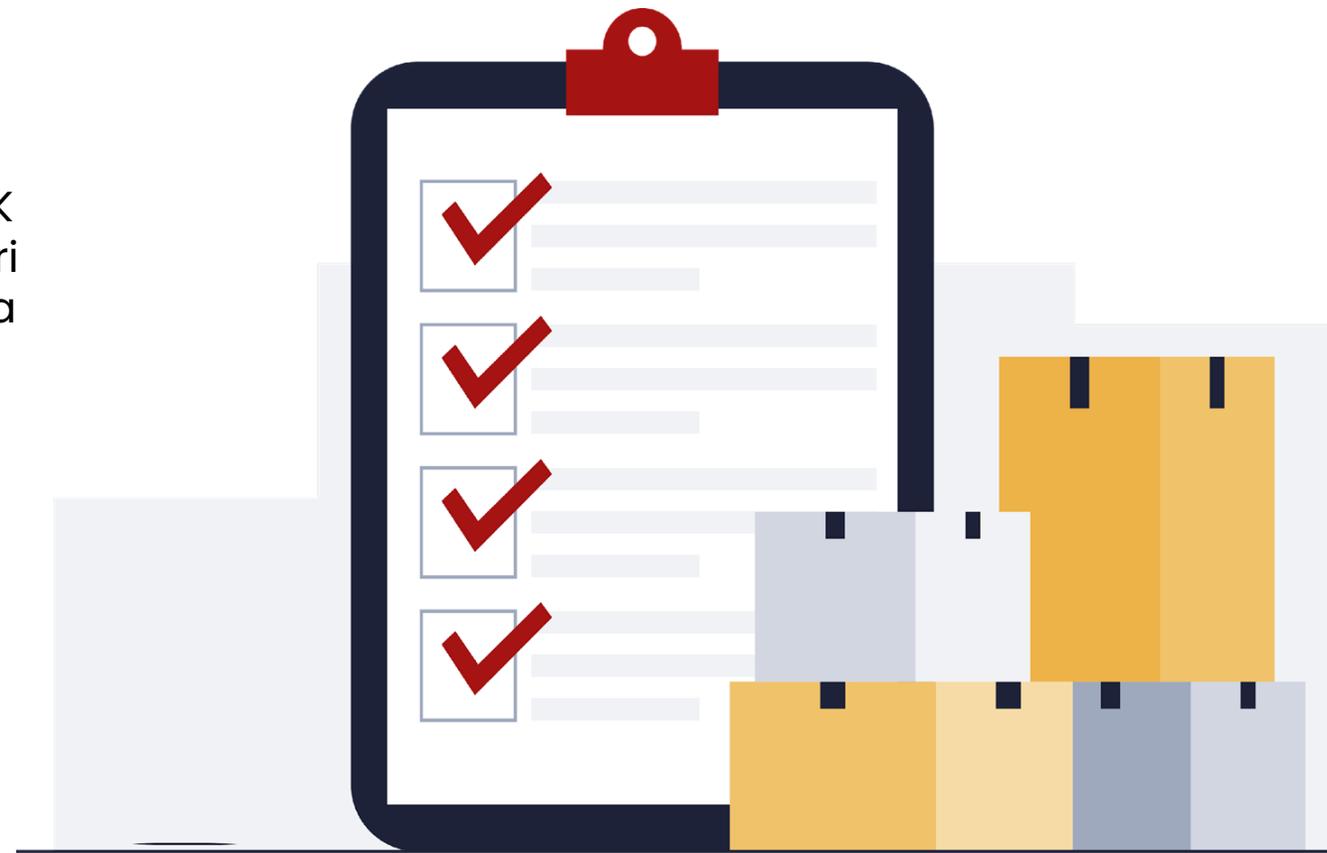


LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Penyimpangan pada tahap Pemilihan

1. Kurangnya analisa pasar
2. Pemilihan metode pemilihan yang kurang tepat
3. Penambahan persyaratan yang tidak perlu/mengada-ada
4. Evaluasi penawaran tanpa juastifikasi teknis
5. Penjadwalan yang dapat merugikan pihak tertentu
6. Persekongkolan (Vertikal/Horizontal)
7. Proses tidak terdokumentasikan
8. Pemalsuan dokumen
9. Kendali pihak yang tidak bertanggungjawab dan Intervensi jahat
10. Klarifikasi dan pembuktian yang tidak optimal
11. Pinjam perusahaan

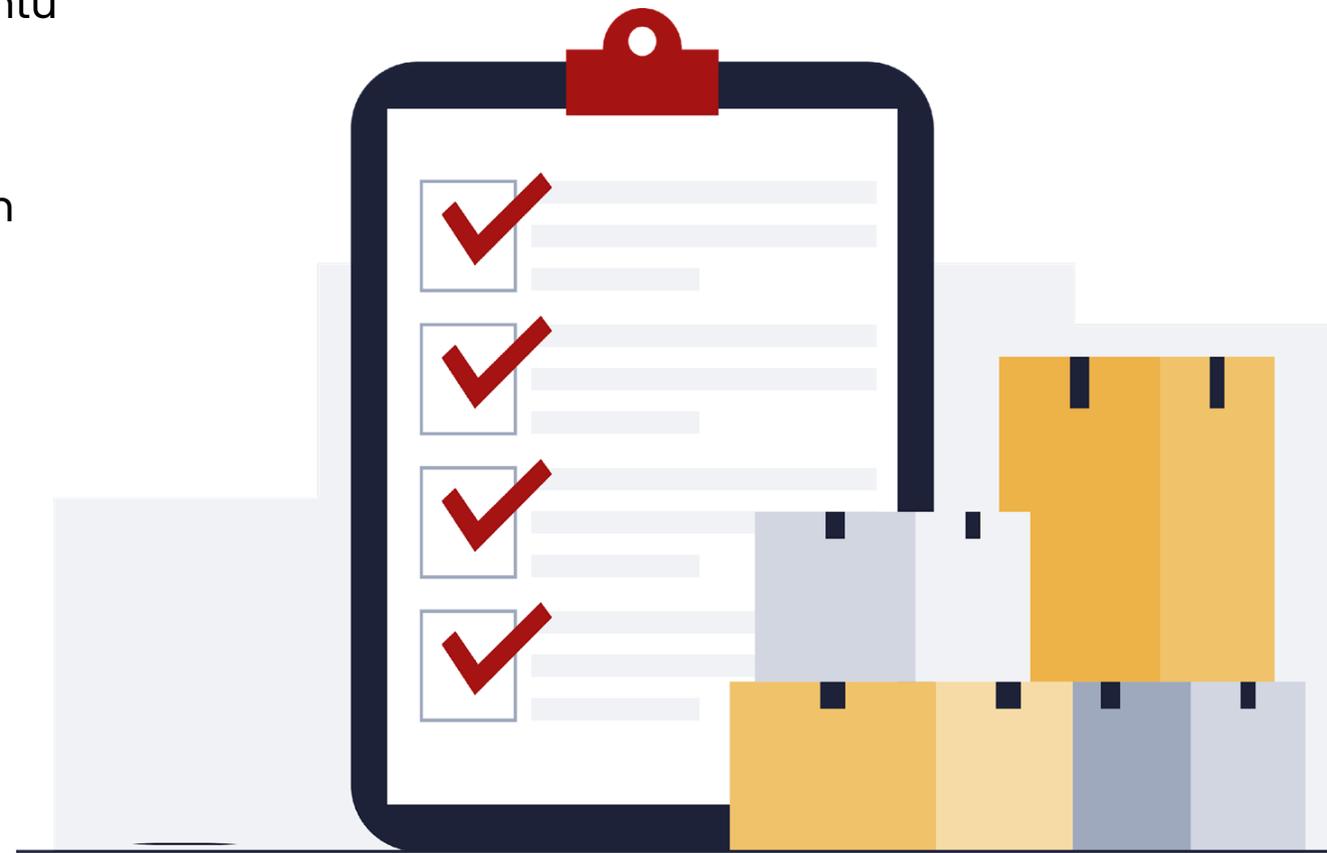


LKPP

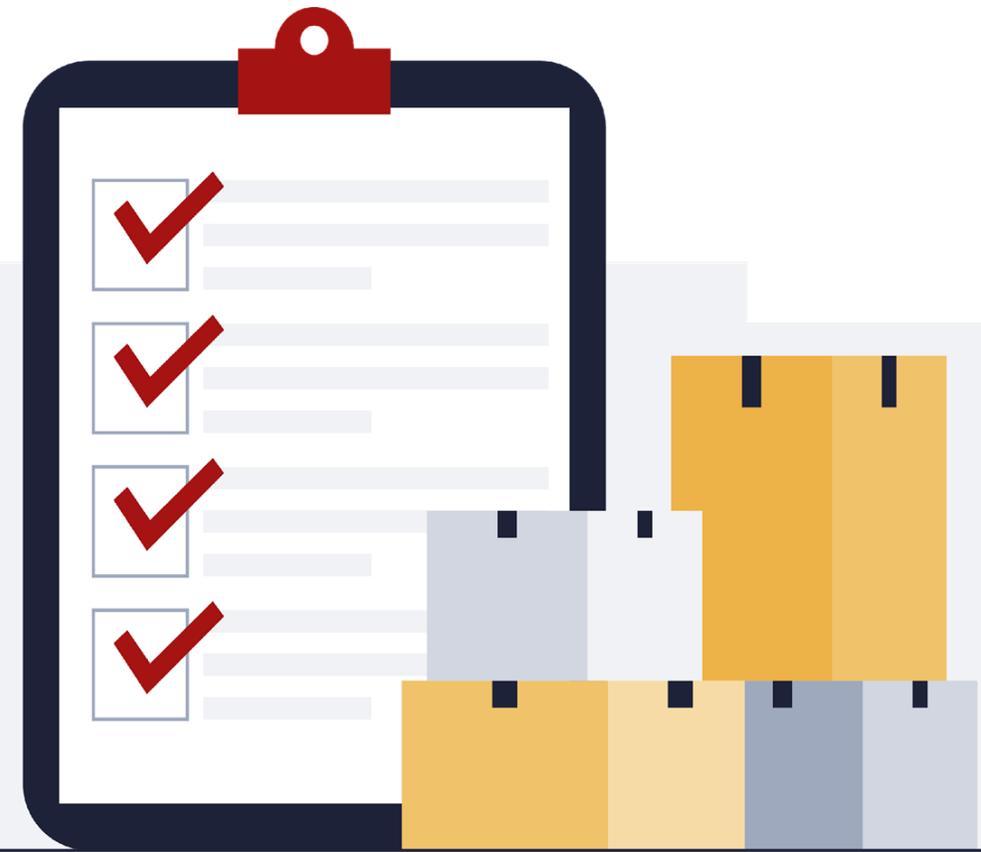
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



1. Adanya pungutan, seperti alasan penjilidan atau biaya lainnya
2. Kontrak yang ditandatangani tidak reliabel
3. Ketidakjelasan yang menandatangani kontrak
4. Pekerjaan dimulai tanpa kontrak
5. Tandatanganan kontrak tanpa pertemuan
6. Tidak dilakukan klarifikasi Jaminan
7. Membuat substansi baru tanpa perubahan kontrak
8. Pengalihan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
9. Lemahnya pengendalian kontrak
10. Tidak dilakukan pemeriksaan hal-hal yang disampaikan dalam penawaran pada saat kontrak
11. Konsultan menggunakan tenaga ahli fiktif
12. Tenaga ahli dalam kontrak tidak pernah diperiksa
13. Pihak yang diberikan kewenangan tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak
14. Tahapan kontrak tidak dilaksanakan
15. Pemalsuan laporan data pekerjaan





1

**Tindak Pidana
Korupsi**

2

**Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU)**

3

**Tindak Pidana
Korporasi (TPK)**

**Tindak Pidana
Perpajakan**

4

Perdata

5

Persaingan Usaha

6



1. Memperbanyak **jumlah produk tayang** di e-Katalog
2. Memperbanyak **jumlah penyedia** pada setiap etalase
3. Mendorong penggunaan **mini kompetisi** dalam e-purchasing untuk mendapatkan harga terbaik
4. Melakukan **negosiasi harga** dimulai dari Penyedia dengan **harga terendah** yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan
5. APIP melakukan **pengawasan** yang difokuskan pada peningkatan jumlah produk tayang dan jumlah Penyedia
6. APIP melakukan **money** terhadap pelaksanaan e-purchasing
7. **Hindari praktik KKN** dalam proses e-Katalog



LKPP

Produk Tayang Katalog

Jumlah Produk Tayang e-Katalog

7,476,668
Jumlah Produk (All Time)

3 minutes ago

Jumlah Produk Tayang e-Katalog

5,184,836
Jumlah Produk (Sesuai Filter Tanggal)

3 minutes ago

Jumlah Produk Tayang e-Katalog Nasional

2,124,049
Jumlah Produk Katalog Nasional (All Time)

3 minutes ago

Jumlah Produk Tayang e-Katalog Nasional

864,356
Jumlah Produk Katalog Nasional (Sesuai Filter Tanggal)

3 minutes ago

Jumlah Produk Tayang e-Katalog Lokal

4,406,104
Jumlah Produk Katalog Lokal (All Time)

3 minutes ago

Jumlah Produk Tayang e-Katalog Lokal

3,650,773
Jumlah Produk Katalog Lokal (Sesuai Filter Tanggal)

3 minutes ago

Jumlah Produk Tayang e-Katalog Sektoral

946,515
Jumlah Produk Katalog Sektoral (All Time)

3 minutes ago

Jumlah Produk Tayang e-Katalog Sektoral

669,707
Jumlah Produk Katalog Sektoral (Sesuai Filter Tanggal)

3 minutes ago



Transaksi ePurchasing Katalog

Jumlah Transaksi ePurchasing Katalog Seluruhnya

1,770,599
Jumlah Transaksi (All Time)

7 minutes ago

Jumlah Transaksi ePurchasing Katalog Seluruhnya

191,760,747,699,619
Jumlah Nominal Transaksi (All Time)

7 minutes ago

Jumlah Transaksi ePurchasing Katalog Filter Tanggal

1,736,656
Jumlah Transaksi (Sesuai Filter Tanggal)

7 minutes ago

Jumlah Nominal Transaksi ePurchasing Katalog Filter Tanggal

182,847,158,761,583
Jumlah Nominal Transaksi (Sesuai Filter Tanggal)

7 minutes ago

Jumlah Transaksi Berdasarkan Jenis_Penyedia - Pie chart Jumlah Transaksi ePurchasing Katalog UMK



6 minutes ago

Jumlah Transaksi Berdasarkan Jenis_Penyedia - Pie chart Jumlah Transaksi ePurchasing Katalog UMK



6 minutes ago

"Inovasi adalah kreasi yang baru atau menata ulang yang lama dengan cara yang baru." – Michael Vence

Terima Kasih